



JURNAL ILMIAH HUKUM
DE'JURE
KAJIAN ILMIAH HUKUM
FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG

JIH ~ DE'JURE	Vol. 4	No. 1	Halaman 1-188	Mei 2019	ISSN: 2541-1594
---------------	--------	-------	---------------	----------	-----------------

θ **DECLARATION OF BASIC PRINCIPLES OF JUSTICE FOR VICTIMS OF CRIME AND ABUSE OF POWER HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN**

Bambang Widiyantoro

θ **IDENTITAS BARU TRANSEKSUAL DAN STATUS HUKUM PERKAWINANNYA**

Holyness Nurdin Singadimedja, Agus Mulya Karsona, dan Afra Fathina Azzahra

θ **ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PELAYANAN HUKUM DI KOTA BEKASI**

Ina Heliany

θ **KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERHITUNGAN POTENSI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA**

Indra Yudha Koswara

θ **PENGANGKATAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT**

Lalu Muhammad Fauzi, M. Galang Asmara dan Zunnuraeni

θ **HOSPITAL BYLAWS: IMPLIKASI PENERAPANNYA**

Lalu Riyana Dody Setiawan, M. Galang Asmara, dan Chrisdianto Eko Purnomo

θ **REFORMA AGRARIA HAMBATAN DAN TANTANGAN DI KABUPATEN KARAWANG**

Pamungkas Satya Putra

θ **PERJANJIAN KERJASAMA PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI KABUPATEN KARAWANG**

Rahmi Zubaedah, Ella Nurlailasari, dan Nelly Apriningrum

θ **PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM PASAR MODAL PADA PENGADILAN NEGERI**

Sherly Ayuna Putri, Ema Rahmawati, dan Nun Harrieti

θ **WEWENANG PRAPERADILAN: MEMERIKSA DAN MEMUTUS PENETAPAN STATUS TERSANGKA**

Wahyu Rahman



JURNAL ILMIAH HUKUM DE'JURE KAJIAN ILMIAH HUKUM

Susunan Redaksi (Board of Editors)

Penanggung jawab (<i>Head of Advisor</i>)	:	Dekan Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang
Mitra Bestari (<i>Peer Reviewer</i>)	:	Prof. Dr. Tarsisius Murwadji, S.H., M.H Prof. Dr. Nandang Sambas, S.H., M.H Dr. Abdul Atsar, S.H., S.Pd., M.H Dr. Bambang Daru, S.H., M.H Dr. Hernadi, S.H., LL.M
Pemimpin Redaksi (<i>Editor in Chief</i>)	:	Pamungkas Satya Putra, S.H., M.H
Dewan Editor (<i>Editorial Board</i>)		
Manajer Editor (<i>Managing Editor</i>)	:	M. Holyone Nurdin Singadimedja, S.H., M.H Rahmi Zubaedah, S.H., M.H
Manajer Keuangan (<i>Manager in Finance</i>)	:	Taufik Paribo Uswatun Hassanah Imam Nurzaman M. Saeful Ridwan Ryan Pahlevi
Manajer Pemasaran (<i>Manager in Marketing</i>)	:	Maharani Nurdin Mansyur Anden
Editor Bahasa Indonesia (<i>Editor in Indonesia Language</i>)	:	Slamet, S.Pd., M.Pd
Editor Bahasa Inggris (<i>Editor in English Language</i>)	:	Dini, S.Pd., M.Pd
Editor Tata Letak & Sampul (<i>Layout & Cover</i>)	:	Ahmad Mubarak, S.Ds., M.M Ilham Fitrahriansyah Muhammad Mahfud
Penerbit (<i>Publisher</i>)	:	Lembaga Kajian Hukum (LKH) Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Alamat (*Address*) Redaksi:

REDAKSI JURNAL ILMIAH HUKUM DE'JURE: KAJIAN ILMIAH HUKUM

J I H ~ DE'JURE ~ K I H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG

Jl. H.S. Ronggowaluyo Telukjambe Karawang

Telp. (0267) 640759; Faks. (0267) 640759

Website: www.fh.unsika.ac.id

Email: dejure@unsika.ac.id

Jurnal ini dapat diunduh pada menu e-jurnal pada laman <http://journal.unsika.ac.id/>



**JURNAL ILMIAH HUKUM
DE'JURE
KAJIAN ILMIAH HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG**

Volume 4 Nomor 1

ISSN: 2541-1594

Mei 2019

J I H ~ DE'JURE merupakan Jurnal Ilmiah Hukum yang memuat naskah di bidang ilmu hukum serta analisis dan peran serta akademisi, praktisi dan masyarakat dalam merepresentasikan kebebasan berpendapat dan pembahasan soal isu-isu di bidang hukum.

J I H ~ DE'JURE merupakan media publikasi ilmiah yang terbit sebanyak dua nomor dalam satu tahun (Mei dan September).

**Setiap substansi Jurnal dapat dikutip dengan menyebutkan sumbernya
(Citation is permitted with acknowledgement of the source)**

**Segala pendapat yang dimuat dalam Jurnal
ini tidak mewakili pendapat resmi dari
Fakultas Hukum Universitas
Singaperbangsa Karawang**



J I H ~ DE'JURE ~ K I H Redaksi

Sidang Pembaca yang dirahmati Tuhan yang Maha Esa

Jurnal Ilmiah Hukum “De’Jure” merupakan Jurnal Ilmu Hukum yang dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang. Jurnal tersebut merupakan hasil penelitian serta kajian gagasan konseptual di bidang ilmu hukum terhadap isu-isu hukum, konseptual dalam tataran teori dan praktik, putusan pengadilan, analisis kebijakan pemerintah dan pemerintahan daerah serta analisis hal-hal lainnya di bidang ilmu hukum yang tidak dapat terlepas sebagai ilmu pengetahuan. Jurnal Ilmiah Hukum “De’Jure” merupakan hasil penelitian berupa tulisan baik dari kalangan civitas akademika Universitas Singaperbangsa Karawang pada umumnya maupun hasil sumbangsi Tenaga Pengajar di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang serta peran aktif dari penulis-penulis lain di luar Universitas Singaperbangsa Karawang. Jurnal tersebut ditujukan kepada seluruh mahasiswa/i, masyarakat, para pakar, akademisi, praktisi, penyelenggara negara, LSM serta pemerhati ilmu hukum.

Jurnal Ilmiah Hukum “De’Jure” telah memiliki *International Standard Serial Number-ISSN* (Nomor Seri Standar Internasional) sebagai sebuah nomor khusus yang sering digunakan untuk mengidentifikasi setiap publikasi berkala dan diberikan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) berdasarkan Surat Keputusan Nomor 0005.115/JL.3.2/SK.ISSN/2015.03. Volume ini diyakini dapat memberikan sentuhan dan warna baru di dalam perkembangan ilmu hukum khususnya Hukum Indonesia. Harapan Tim Redaksi yaitu dapat memberikan sumbangsi pemikiran/gagasan pada pembaharuan Hukum Indonesia dan setidaknya memberikan secerca sinar terang dalam hutan belantara nan gelap sebagai ungkapan terhadap pengaturan dan penerapan Hukum Indonesia dengan keyakinan Indonesia akan menjadi lebih bermartabat berdasarkan Pancasila.

Terdapat sekitar sepuluh (10) naskah yang mengkaji dan menganalisis tentang dinamika ilmu hukum dan penerapannya yang diawali oleh Bambang Widiyantoro yang berjudul “*Declaration of Basic Principles of Justice For Victims of Crime and Abuse of Power Terhadap Perlindungan Korban*” Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu yang bermaksud menguraikan/menggambarkan analisis pengaturan yang ada. Hasil penelitian ini menegaskan perlindungan korban tindak pidana dalam hal-hal yang mendasar, seperti pemberian ganti rugi kepada korban, baik dalam bentuk *restitusi* maupun *kompensasi*, telah diatur dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*.

Kedua, terdapat tulisan dari Holyness Nurdin Singadimedja, Agus Mulya Karsona, dan Afra Fathina Azzahra yang berjudul “*Identitas Baru Transeksual dan Status Hukum Perkawinannya*” di mana artikel ini dikhususkan pada transeksual dapat mendapatkan identitas yang baru dengan cara mendapatkan penetapan pengadilan mengenai perubahan identitas barunya dan selanjutnya dicatatkan ke Pencatatan Sipil dan perkawinan dimungkinkan bagi seorang transeksual yang telah mendapat penetapan

pengadilan dan sudah dicatatkan di pencatatan sipil untuk melangsungkan perkawinan asalkan syarat perkawinan tersebut tidak dilarang atau bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam agama dari orang yang bersangkutan. Ketiga, tulisan dari Ina Heliany ikut serta dalam memberikan kontribusi melalui tulisan yang berjudul berjudul “Kebijakan Publik Dalam Pelayanan Hukum di Kota Bekasi”. Tulisan tersebut menekankan bahwa dalam implementasinya keadaan ini jelas bertolak belakang dengan “Potret Buram” pelayanan hukum yang terjadi di Pengadilan Negeri Klas IA Kota Bekasi. Dari tertundanya jadwal sidang, proses yang berbeli-belit dan mahalnya proses di persidangan. Sehingga hal ini menimbulkan ketidakpuasan masyarakat karena masih buruknya pelayanan yang diberikan. Keempat, Indra Yudha Koswara yang berjudul “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perhitungan Potensi Kerugian Keuangan Negara” di mana mempersoalkan kewenangan BPK dan BPKP dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan negara juga diperlukan untuk menentukan jumlah uang pengganti yang harus dibayar terpidana. Sebab selain dapat dijatuhi pidana pokok dan pidana tambahan dalam KUHP, terpidana korupsi juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Hasil penelitian ini mengharuskan perlunya penghitungan keuangan untuk menentukan besar kecilnya kerugian negara.

Kelima, Lalu Muhammad Fauzi, M. Galang Asmara, dan Zunnuraeni yang berjudul “Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat” yang menegaskan bahwa terdapat ketidakjelasan norma dalam pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota Perspektif Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Ketidakjelasan tersebut khususnya berkenaan dengan pengisian jabatan sekretaris daerah dalam kasus belum berakhirnya lima tahun masa jabatan sekretaris daerah sebelumnya. Keenam, Lalu Riyana Dody Setiawan, M. Galang Asmara, dan Chrisdianto Eko Purnomo dengan tulisan yang berjudul “*Hospital Bylaws: Implikasi Penerapannya*” memberikan pendapat bahwa *Hospital Bylaws* mencakup Peraturan Internal Korporasi (*Corporate Bylaws*) dan Peraturan Internal Staf Medis (*Medical Staff Bylaws*). Implikasi Hukum Dari Peraturan Internal Rumah Sakit “*Hospital Bylaws*”, *Pertama*, Rumah Sakit wajib membentuk peraturan internal rumah sakit. *Kedua*, Adanya hak dan kewajiban pemilik, Pengelola dan Staf Medis di Rumah Sakit serta kejelasan tugas, fungsi dan jangkauan kewenangan. *Ketiga*, Kewajiban rumah sakit untuk menyelenggarakan tata kelola perusahaan yang baik dan tata kelola klinis yang baik. *Ketujuh*, Pamungkas Satya Putra yang berjudul “Reforma Agraria Hambatan dan Tantangan di Kabupaten Karawang” memberikan pandangan bahwa Kendala pelaksanaan pendaftaran tanah terhadap masyarakat di Kantor Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Karawang disebabkan oleh pelaksanaan peralihan hak atas tanah. Kendala disebabkan karena adanya faktor intern dan faktor ekstern. Penyelesaian terhadap kendala pelaksanaan pendaftaran tanah di Kantor Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Karawang pertama dimulai dengan memperkuat kinerja yang transparan akuntabilitas serta melakukan pengawasan. Tujuan diadakannya pendaftaran tanah oleh Pemerintah untuk

menjamin kepastian hukum. Untuk itu diperlukan adanya kaidah hukum yang dapat dipergunakan oleh Negara Indonesia dalam mengatur tatanan kehidupan dalam masyarakat.

Kedelapan, Rahmi Zubaedah, Ella Nurlailasari, dan Nelly Apriningrum memberikan kontribusi tulisan yang berjudul “Perjanjian Kerjasama Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Karawang” dengan menganalisis dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama pemberian pelayanan jaminan kesehatan nasional antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan klinik kesehatan di Kecamatan Teluk Jambe Timur Kabupaten Karawang berjalan dengan baik karena pembayaran biaya pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama menggunakan sistem pembayaran kapitasi. Apabila terjadi tindakan wanprestasi dari salah satu dalam pelaksanaan perjanjian dilakukan alternatif penyelesaian sengketa dengan cara mediasi, apabila tidak disepakati, maka dapat mengajukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Kesembilan yaitu Sherly Ayuna Putri, Ema Rahmawati, dan Nun Harrieti yang memberikan kontribusi melalui tulisan yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Hukum Pasar Modal Pada Pengadilan Negeri” menegaskan bahwa sektor pasar modal merupakan salah satu sektor jasa keuangan yang memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Kondisi pada saat ini, terdapat banyak kritik terhadap penyelesaian sengketa di pasar modal yang disebabkan banyak faktor terkait penegakan hukum, sehingga upaya menciptakan pasar modal yang teratur wajar dan efisien belum tercapai optimal. Peranan pengadilan negeri dalam penyelesaian sengketa pasar modal dalam praktik dan peranan penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri terhadap penegakan hukum pasar modal di Indonesia. Tulisan kesepuluh ada tulisan dari Wahyu Rahman yang berjudul “Wewenang Praperadilan: Memeriksa dan Memutus Penetapan Status Tersangka” di mana praperadilan merupakan suatu lembaga untuk menguji keabsahan suatu proses perkara pidana sebelum perkara tersebut sampai pada tahap pemeriksaan pokok perkara di pengadilan. ruang lingkup wewenang praperadilan terbatas pada Pasal 1 butir 10 *Juncto*. Pasal 77 KUHAP dan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014, sehingga Putusan Praperadilan Nomor: 24/Pid/Prad/2018/PN.Jkt.Sel yang memerintahkan KPK untuk menetapkan status tersangka melampaui batas wewenang praperadilan.

Tim Redaksi menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan yang merupakan kelemahan tersendiri baik dari segi desain cetak, substansi dan hal-hal lainnya. Untuk itu Tim Redaksi memohonkan maaf yang sebesar-besarnya. Demi penyempurnaan pada edisi-edisi selanjutnya, tim berharap dengan segala hormat, menerima saran dan pendapat serta kritikan dari para pembaca yang budiman.

Akhir kata Tim Redaksi berharap semoga kehadiran Jurnal edisi ini dapat memperkaya khasanah pengetahuan para Pembaca mengenai dinamika pengaturan dan penerapan hukum di Indonesia dan juga bermanfaat dalam upaya membangun budaya sadar hukum. Semoga penjelasan pada setiap kalimat dan halaman dapat bermanfaat serta wujud

pengembangan diri para penulis untuk mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan mewarnai ide dan saran membangun Hukum Indonesia. Dalam kesempatan ini Tim Redaksi memberikan ucapan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya kepada Civitas Akademika Universitas Singaperbangsa Karawang, Para Penulis, Para Mitra Bestari yang sudah meluangkan waktunya dalam kesibukannya yang padat. Semoga Tuhan selalu merahmati Alam Semesta ini beserta isinya.

Selamat membaca!

Tim Redaksi
Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi JIH ~ De'Jure ~ KIH	iv-vii
DECLARATION OF BASIC PRINCIPLES OF JUSTICE FOR VICTIMS OF CRIME AND ABUSE OF POWER TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN	
<i>Bambang Widiyantoro</i>	1-12
IDENTITAS BARU TRANSEKSUAL DAN STATUS HUKUM PERKAWINANNYA	
<i>Holyness Nurdin Singadimedja, Agus M. Karsona, dan Afra F. Azzahra</i>	13-30
KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PELAYANAN HUKUM DI KOTA BEKASI	
<i>Ina Helianny</i>	31-44
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERHITUNGAN POTENSI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA	
<i>Indra Yudha Koswara</i>	45-62
PENGANGKATAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT	
<i>Lalu Muhammad Fauzi, M. Galang Asmara, dan Zunnuraeni</i>	63-83
HOSPITAL BYLAWS: IMPLIKASI PENERAPANNYA	
<i>Lalu Riyana D. Setiawan, M. Galang Asmara, dan Chrisdianto E. Purnomo</i>	84-109
REFORMA AGRARIA HAMBATAN DAN TANTANGAN DI KABUPATEN KARAWANG	
<i>Pamungkas Satya Putra</i>	110-134
PERJANJIAN KERJASAMA PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI KABUPATEN KARAWANG	
<i>Rahmi Zubaedah, Ella Nurlailasari, dan Nelly Apriningrum</i>	135-149
PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM PASAR MODAL PADA PENGADILAN NEGERI	
<i>Sherly Ayuna Putri, Ema Rahmawati, dan Nun Harrieti</i>	150-165
WEWENANG PRAPERADILAN: MEMERIKSA DAN MEMUTUS PENETAPAN STATUS TERSANGKA	
<i>Wahyu Rahman</i>	166-177
Biodata Penulis	178-179
Pedoman Penulisan	180-187
Formulir Berlangganan	188



JIH ~ DE'JURE ~ KIH
FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG
menyampaikan terima kasih

Kepada Para
Mitra Bestari/Penilai (*referee*)
Volume 4 Nomor 1 Mei 2019

Prof. Dr. Tarsisius Murwadji, S.H., M.H.

Prof. Dr. Nandang Sambas, S.H., M.H.

Dr. Abdul Atsar, S.H., S.Pd., M.H.

Dr. Bambang Daru, S.H., M.H.

Dr. Hernadi, S.H., LL.M.